

Received: 2025-04-15, Received in revised form: 2025-06-14, Accepted: 2025-06-30

## Evaluasi Kinerja Lembaga Akreditasi Dayah di Aceh: Kajian Literatur tentang Efektivitas dan Dampaknya

Ilham Mirsal<sup>1</sup>, Adnin AS<sup>2</sup>, Karnita Sartina<sup>1</sup>, Zulfan Irwansuri<sup>1</sup>,  
Muhammad Rusdi<sup>3</sup>, Rafiqa Noviyani<sup>4</sup>, Muhammad Ali Akbar<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Tapaktuan, <sup>2</sup>Universitas Al Washliyah Banda Aceh,

<sup>3</sup>Universitas Medan Area, <sup>4</sup>IAI Sumbar Pariaman

e-mail: \* ayahilham234@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.47766/itqan.v16i1.6076>

### ABSTRACT

This study aims to evaluate the effectiveness and impact of dayah accreditation bodies in Aceh as instruments for improving the quality of Islamic religious education. The study employs a library research approach with content analysis of scholarly articles, research reports, local regulations such as the Qanun Dayah, and other supporting documents. The findings reveal that the accreditation process has significantly improved dayah management, including the implementation of more systematic documentation, data digitalization, and increased transparency and accountability. Accreditation has also strengthened teachers' professional competencies through training and fostered a culture of continuous evaluation. However, challenges remain, such as limited human resources, internal resistance to change, administrative burdens, and potential biases that emphasize document completeness over substantive educational quality. Public and stakeholder perceptions of the performance of dayah accreditation bodies are generally positive, as accreditation is viewed as enhancing public trust and the reputation of dayah institutions. Nevertheless, criticisms arise concerning insufficient public dissemination, limited transparency of accreditation results, and concerns that uniform national standards might diminish local cultural identity. The study concludes that dayah accreditation should not be merely an administrative formality but can serve as a transformative strategy for educational quality improvement, if supported by substantive evaluations, harmonization of national standards with local values through the Qanun Dayah, education-based public communication, and active engagement of strategic stakeholders.

**Keywords:** *Dayah Accreditation, Education Quality, Public Perception, Educational Management*

Copyright Holder: © Ilham Mirsal, Adnin AS, Karnita Sartina, Zulfan Irwansuri, Muhammad Rusdi, Rafiqa Noviyani, Muhammad Ali Akbar (2025)

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan dampak kinerja lembaga akreditasi dayah di Aceh sebagai instrumen peningkatan mutu pendidikan keagamaan. Studi ini menggunakan pendekatan library research dengan analisis isi (content analysis) terhadap jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian, regulasi lokal seperti Qanun Dayah, serta dokumen pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses akreditasi mendorong perbaikan signifikan pada manajemen dayah, seperti penerapan sistem dokumentasi yang lebih baik, digitalisasi data, dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas. Akreditasi juga memperkuat kompetensi tenaga pendidik melalui pelatihan dan menciptakan budaya evaluasi berkelanjutan. Namun, beberapa kendala masih ditemukan, termasuk keterbatasan SDM, resistensi internal, beban administratif, serta potensi bias penilaian yang lebih menekankan aspek dokumen daripada kualitas substansi pembelajaran. Persepsi masyarakat dan stakeholder terhadap lembaga akreditasi dayah secara umum positif karena dianggap meningkatkan kepercayaan publik dan reputasi dayah. Meski demikian, kritik muncul terkait kurangnya sosialisasi, keterbukaan hasil akreditasi, dan kekhawatiran homogenisasi standar yang dapat mengurangi ciri khas tradisi lokal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa akreditasi dayah bukan sekadar formalitas administratif, tetapi dapat menjadi strategi transformasi mutu pendidikan jika disertai evaluasi substantif, harmonisasi standar nasional dengan nilai lokal melalui Qanun Dayah, komunikasi publik berbasis edukasi, serta pelibatan aktif berbagai stakeholder strategis.

**Kata Kunci:** *Akreditasi Dayah, Mutu Pendidikan, Persepsi Masyarakat, Manajemen Pendidikan*

### PENDAHULUAN

Dayah merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional di Aceh yang memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, moral, dan intelektual masyarakat. Sebagai institusi yang telah mengakar dalam budaya lokal, dayah tidak hanya menjadi tempat belajar ilmu agama, tetapi juga berperan penting dalam membangun nilai-nilai sosial dan memperkuat identitas keislaman masyarakat Aceh (Prasetyo et al., 2025).

Dalam konteks peningkatan mutu pendidikan, akreditasi dayah menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan adanya standar kualitas pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan. Akreditasi bertujuan membantu lembaga pendidikan melakukan evaluasi mandiri dan perbaikan berkelanjutan, sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat dan pemerintah terhadap mutu pendidikan (Awaludin, 2017; Iskanto et al., 2022). Sebagai bentuk evaluasi sumatif dan formatif, akreditasi mencakup penilaian konteks, input, proses, dan output (Stufflebeam, 2003), sehingga diharapkan mampu

membantu dayah bertransformasi menjadi lembaga yang adaptif dan modern, namun tetap berakar pada nilai-nilai lokal.

Namun, pelaksanaan akreditasi dayah di Aceh menghadapi sejumlah tantangan aktual di lapangan. Penelitian Maskuri et al. (2020) menunjukkan adanya kesenjangan antara metode pendidikan tradisional dayah dengan persyaratan formal akreditasi, yang kerap menimbulkan resistensi. Tantangan lainnya meliputi kurangnya transparansi proses akreditasi, belum optimalnya penerapan standar mutu yang sesuai dengan konteks dayah, serta keterbatasan kapasitas manajemen dan pendataan yang berdampak pada efektivitas akreditasi (Asy'ari et al., 2021).

Lebih jauh, meskipun sudah ada sejumlah penelitian mengenai akreditasi sekolah dan madrasah (Azizah & Witri, 2021; Afridoni et al., 2022), hingga saat ini belum ada kajian yang secara khusus dan komprehensif menilai efektivitas kinerja lembaga akreditasi dayah di Aceh dari perspektif multidimensional, baik dari segi kebijakan, pelaksanaan, maupun dampaknya terhadap mutu pendidikan. Padahal, evaluasi menyeluruh sangat dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan apakah akreditasi benar-benar berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan dayah dan relevansi pembelajarannya dengan perkembangan zaman.

Penelitian ini penting dan memiliki urgensi yang tinggi. Pertama, sebagai upaya mendukung keberlanjutan dan penguatan peran dayah dalam sistem pendidikan Aceh. Kedua, sebagai dasar pengambilan kebijakan untuk memperbaiki sistem akreditasi agar lebih sesuai dengan karakteristik dayah. Ketiga, sebagai kontribusi ilmiah yang memperkaya kajian evaluasi kebijakan dan kinerja lembaga pendidikan berbasis tradisi Islam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas dan dampak kinerja lembaga akreditasi dayah di Aceh melalui kajian literatur. Manfaat penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi perbaikan kebijakan akreditasi dayah dan memperkuat kualitas manajemen pendidikan dayah, sehingga dapat lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga memiliki implikasi praktis untuk mendukung transformasi pendidikan dayah di Aceh menjadi lebih berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyintesis informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian.

Pendekatan ini dipilih karena penelitian difokuskan pada evaluasi kinerja lembaga akreditasi dayah di Aceh melalui penelaahan dokumen, artikel jurnal, dan laporan penelitian yang telah dipublikasikan, sehingga tidak memerlukan pengumpulan data lapangan secara langsung (Sugiyono, 2017).

Objek kajian dalam penelitian ini adalah kebijakan, sistem, dan proses akreditasi yang dilaksanakan oleh lembaga akreditasi dayah di Aceh sebagaimana terekam dalam dokumen kebijakan, laporan hasil akreditasi, artikel jurnal ilmiah, dan sumber literatur relevan lainnya. Dengan demikian, penelitian ini memusatkan perhatian pada bagaimana pelaksanaan akreditasi dayah berjalan, faktor pendukung dan penghambatnya, serta dampaknya terhadap mutu pendidikan.

Pendekatan evaluatif yang digunakan dalam penelitian ini bersifat eksploratif berbasis literatur, yang menganalisis efektivitas dan dampak akreditasi dayah secara tematik dan komparatif. Penelitian ini tidak secara khusus menggunakan model evaluasi CIPP, namun tetap mengidentifikasi dimensi konteks kebijakan, input, proses, dan hasil akreditasi sebagai bagian dari tema yang dianalisis, sesuai dengan tujuan penelitian. Sumber data dalam penelitian ini meliputi artikel jurnal ilmiah, buku akademik, laporan hasil akreditasi, dokumen resmi kebijakan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Pemilihan sumber data didasarkan pada kriteria kredibilitas, keterkinian, dan relevansi terhadap topik akreditasi dayah (Creswell, 2014).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan dan mengkaji dokumen-dokumen tertulis yang sudah tersedia, baik dalam bentuk cetak maupun digital (Moleong, 2018). Adapun teknik analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*), yaitu proses sistematis untuk mengidentifikasi pola, tema, dan makna yang muncul dari data. Proses ini dilakukan dengan langkah-langkah: membaca secara mendalam, melakukan kategorisasi berdasarkan tema penelitian (misalnya: kebijakan, pelaksanaan, efektivitas, dan dampak akreditasi), kemudian menarik kesimpulan (Krippendorff, 2018).

Teknik pengujian keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber yang berbeda untuk memastikan konsistensi dan keakuratan informasi. Dengan cara ini, peneliti dapat memastikan bahwa data yang digunakan memiliki tingkat keandalan yang tinggi (Lincoln & Guba, 1985). Selain itu, peneliti juga melakukan peer review dengan meminta ahli di bidang yang sama untuk mengevaluasi hasil analisis, sehingga dapat meningkatkan validitas penelitian (Patton, 2015).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Efektivitas Proses Akreditasi Dayah di Aceh**

Bagian ini mengkaji secara sistematis efektivitas proses akreditasi dayah di Aceh dengan membahas empat aspek utama: a) Proses dan standar akreditasi yang diterapkan; b) Faktor-faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat efektivitas akreditasi; c) Peran regulasi dan kebijakan, termasuk Qanun Dayah sebagai instrumen legal penting; serta d) Evaluasi dampak akreditasi terhadap mutu pendidikan, manajemen, dan profil lulusan dayah.

Melalui analisis tematik berbasis literatur ini, penelitian berupaya menyoroti tidak hanya capaian positif, tetapi juga tantangan dan potensi transformasi dayah ke depan, agar tetap adaptif tanpa kehilangan akar tradisi.

#### **a. Proses dan Standar Akreditasi Dayah di Aceh**

Proses akreditasi dayah di Aceh secara umum dilakukan melalui penilaian komprehensif yang mencakup kurikulum, fasilitas, tenaga pendidik, manajemen, dan hasil pembelajaran. BAN-S/M menjadi lembaga yang berwenang melakukan evaluasi terhadap mutu pendidikan dayah. Tujuannya selaras dengan teori evaluasi program oleh Miles & Huberman (1994), yaitu untuk melihat peningkatan kualitas output pendidikan serta kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan.

Studi Fauzi et al. (2022) menyebutkan bahwa standar nasional menjadi acuan utama, sementara Awaludin (2017) menekankan akreditasi sebagai instrumen penjaminan mutu yang menilai kesesuaian kondisi nyata dengan standar ideal. Namun, Qamariah (2020) menyoroti pentingnya regulasi seperti Qanun Aceh sebagai payung hukum yang memperkuat posisi akreditasi dalam sistem pendidikan dayah.

Meski begitu, implementasi standar ini seringkali menghadapi realitas dayah yang memiliki tradisi pendidikan berbasis kitab kuning dan metode sorogan/bandongan yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan kurikulum nasional (Silahuddin, 2016). Ini memunculkan tantangan bagi proses akreditasi agar tetap menghormati tradisi sekaligus mendorong inovasi.

#### **b. Faktor Penghambat dan Pendukung**

Efektivitas akreditasi dayah dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor pendukung antara lain: adanya pelatihan dan pendampingan dari lembaga terkait. Herianto et al. (2019) menemukan bahwa workshop dan bimbingan teknis membantu dayah lebih siap menyusun dokumen akreditasi dan memenuhi standar.

Sebaliknya, faktor penghambat mencakup keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya literasi administrasi, serta keterbatasan sarana dan

prasarana (Zà et al., 2021). Beberapa dayah juga masih memiliki persepsi negatif bahwa akreditasi hanyalah formalitas administratif, bukan upaya peningkatan mutu substantif.

Menariknya, jika dibandingkan, Herianto et al. (2019) fokus pada pendekatan pelatihan teknis, sementara Qamariah (2020) melihat regulasi sebagai landasan penting agar akreditasi berjalan konsisten. Perpaduan keduanya menjadi kunci: regulasi memberi arah, pelatihan memberi kapasitas.

**Tabel 1: Faktor Pendukung & Penghambat Akreditasi Dayah**

Aspek	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Regulasi & Kebijakan	Qanun Dayah; standar BAN-S/M	Adaptasi regulasi lokal yang lambat; perubahan cepat
SDM	Komitmen pimpinan; pelatihan	Guru kurang terampil di administrasi dan teknologi
Teknologi & Sarana	Sistem digital untuk data akreditasi	Infrastruktur IT tidak merata
Budaya Organisasi	Kesadaran mutu	Resistensi perubahan; khawatir nilai tradisi hilang
Dukungan Masyarakat	Peran alumni dan wali santri	Pemahaman masyarakat yang masih minim soal akreditasi

**c. Peran Regulasi dan Kebijakan**

Qanun Aceh tentang penyelenggaraan pendidikan dayah diidentifikasi sebagai kebijakan strategis yang mendukung legalitas dan standarisasi akreditasi (Qamariah, 2020). Regulasi ini diharapkan menjadi dasar agar dayah tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga substantif, yaitu relevansi kurikulum dan peningkatan kualitas lulusan.

Tambingon dkk. (2025) menambahkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga akreditasi, dan masyarakat agar akreditasi tidak hanya menjadi proses birokratis, melainkan alat peningkatan mutu yang diakui dan didukung publik. Kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan dayah tradisional, misalnya fleksibilitas standar tertentu, juga dianggap penting agar akreditasi tidak memaksakan homogenisasi.

#### **d. Evaluasi Dampak Akreditasi**

Indikator efektivitas akreditasi dapat dilihat melalui beberapa aspek:

- 1) Peningkatan jumlah dayah terakreditasi: data dari Dinas Pendidikan Dayah Aceh menunjukkan kenaikan signifikan jumlah dayah yang terakreditasi sejak 2018.
- 2) Peningkatan mutu layanan: studi Arfiansyah (2026) menemukan bahwa pasca-akreditasi, banyak dayah memperbaiki kurikulum, manajemen, serta sarana belajar.
- 3) Penguatan profil lulusan: alumni dayah semakin diterima di perguruan tinggi dan pasar kerja (Nasir, 2023).

Namun demikian, sebagian penelitian (Silahuddin, 2016; Zà et al., 2021) mengingatkan bahwa transformasi belum merata. Beberapa dayah masih kesulitan keluar dari metode tradisional menuju sistem manajemen modern.

Temuan studi pustaka ini menunjukkan bahwa akreditasi dayah bukan sekadar instrumen administratif, tetapi juga strategi penjaminan mutu yang memerlukan: (a) regulasi yang kontekstual dan responsive, (b) dukungan SDM melalui pelatihan, (c) partisipasi aktif masyarakat, dan (d) kesadaran pengelola dayah akan pentingnya perubahan substansi, bukan hanya kelengkapan dokumen. Dengan demikian, akreditasi dapat benar-benar menjadi alat transformasi pendidikan dayah agar lebih berkualitas, adaptif, dan relevan dengan perkembangan zaman.

## **2. Dampak Akreditasi terhadap Manajemen dan Pengelolaan Dayah**

Akreditasi memberikan dampak signifikan pada manajemen dan pengelolaan dayah di Aceh. Proses ini mendorong penguatan sistem administrasi, akuntabilitas, dan penerapan manajemen modern. Robbins & Coulter (2012) menekankan bahwa standardisasi melalui akreditasi mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen lembaga pendidikan.

Menurut Novidayanti et al. (2024), penerapan standar akreditasi membuat dayah lebih sistematis dalam perencanaan kurikulum, manajemen keuangan, serta pengelolaan sarana-prasarana. Penelitian Muhammad (2023) juga menunjukkan pentingnya sistem dokumentasi yang terstruktur sebagai fondasi manajemen mutu. Selain itu, akreditasi mendorong inovasi seperti pemanfaatan sistem informasi berbasis web dan digitalisasi data, mempermudah monitoring dan evaluasi. Akibatnya, pengelolaan dayah menjadi lebih responsif terhadap tuntutan zaman.

Akreditasi juga berdampak pada penguatan kompetensi tenaga pengajar. Melalui tuntutan pemenuhan standar, guru dan pengelola dayah terlibat dalam pelatihan dan pengembangan profesional (Albar & Suhayria, 2021; Sumarto,

2019). Budaya transparansi pun tercipta: dayah wajib menyampaikan laporan dan hasil akreditasi kepada publik (Iskamto et al., 2022), sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat (Ragil et al., 2020).

**Tabel 2: Perubahan Pra dan Pasca Akreditasi**

Aspek Manajemen	Sebelum Akreditasi	Setelah Akreditasi
Perencanaan & Evaluasi	Tidak sistematis, berbasis kebiasaan	Lebih terstruktur, berbasis dokumen dan standar
Pengelolaan Data	Manual, sering tercecer	Sistem digital/web, lebih rapi dan mudah diakses
Kompetensi Tenaga Pendidik	Pelatihan terbatas	Pelatihan lebih rutin dan terprogram
Transparansi & Laporan	Terbatas	Laporan terbuka untuk publik & stakeholders
Kepercayaan Masyarakat	Berdasar reputasi tradisi	Lebih tinggi, didukung status akreditasi resmi

Meski dampak positif dominan, implementasi akreditasi juga menghadapi tantangan: a) Resistensi internal; sebagian pengelola dayah merasa akreditasi bertentangan dengan tradisi lokal atau sebagai beban administratif (Radliya & Sidik, 2018). b) Beban dokumen; penyusunan borang dan pelaporan menambah pekerjaan bagi guru dan pimpinan (Naufalin et al., 2022). c) Potensi bias; penilaian akreditasi kadang lebih menekankan kelengkapan administratif daripada kualitas substantif pengajaran (Zà et al., 2021).

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah menjadi dasar hukum penting yang memperkuat posisi dayah sebagai lembaga pendidikan khas Aceh. Qamariah (2020) menegaskan bahwa regulasi lokal ini membantu memastikan bahwa standar akreditasi tetap kontekstual dengan nilai dan tradisi lokal, tanpa mengabaikan tuntutan modernisasi.

Secara keseluruhan, akreditasi tidak hanya meningkatkan kualitas manajemen dayah, tetapi juga mendorong inovasi, meningkatkan daya saing, dan membangun budaya akuntabilitas. Namun, agar lebih efektif dan kontekstual, penting dilakukan: (a) pendampingan untuk mengurangi resistensi dan beban administratif, (b) penekanan evaluasi substantif, bukan hanya formalitas dokumen, dan (c) harmonisasi kebijakan akreditasi dengan Qanun Dayah untuk menjaga keseimbangan antara standar nasional dan kekhasan local. Dengan pendekatan ini, akreditasi dapat menjadi strategi transformasi dayah yang lebih adaptif, modern, dan tetap berakar pada budaya Aceh.



### 3. Persepsi Masyarakat dan Stakeholders terhadap Kinerja Lembaga Akreditasi Dayah

Persepsi masyarakat dan stakeholders terhadap kinerja lembaga akreditasi dayah di Aceh pada umumnya positif. Akreditasi dipandang sebagai upaya penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan, memperkuat kepercayaan publik, serta mendorong modernisasi manajemen dayah. Namun demikian, sejumlah pihak tetap menyoroti tantangan, seperti kurangnya sosialisasi, keterbatasan transparansi, dan kesan bahwa akreditasi masih lebih fokus pada administrasi daripada perbaikan substantif.

Mengacu pada teori persepsi sosial Allport (1954), penilaian publik terbentuk dari pengalaman langsung dan informasi yang diterima. Komunikasi publik dan keterbukaan informasi menjadi kunci strategis. Hal ini membantu menjelaskan bagaimana masyarakat yang memiliki ekspektasi positif cenderung menerima hasil akreditasi secara optimis dan sebaliknya, masyarakat yang sejak awal skeptis tetap memandang hasil akreditasi dengan ragu.

Dalam konteks lembaga pendidikan Islam, akreditasi bukan hanya prosedur administratif, melainkan instrumen untuk membangun legitimasi sosial dan kepercayaan masyarakat—terutama penting bagi dayah yang mengemban fungsi tradisional dan spiritual di Aceh (Yani dan Prasetyo, 2023).

Untuk memperdalam pemahaman, penting juga menelaah bagaimana persepsi tersebut dibentuk oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan pengaruh berbeda. Analisis ini dapat dijelaskan melalui *stakeholder mapping* yang terlibat dan memiliki pengaruh serta kepentingan yang berbeda. Berdasarkan *stakeholder mapping*, pihak-pihak seperti Dinas Pendidikan Dayah, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), pimpinan dayah, wali santri, organisasi kemasyarakatan Islam (ORMAS), dan NGO pendidikan memiliki posisi yang strategis.

- a. Dinas Pendidikan Dayah: pengambil kebijakan dan pengawas utama, memiliki pengaruh tinggi untuk mendorong perbaikan mutu.
- b. MPU dan pimpinan dayah: pemegang otoritas moral dan tradisi; menentukan sejauh mana akreditasi diterima sebagai bagian dari pembaharuan pendidikan.
- c. Wali santri: sebagai konsumen layanan pendidikan, memengaruhi reputasi dan keberlanjutan dayah melalui pilihan pendidikan anak.
- d. NGO dan media lokal: aktor yang mampu memperluas sosialisasi dan memberi tekanan terhadap transparansi lembaga akreditasi.

Dari hasil studi pustaka dan temuan literatur, persepsi masyarakat dan stakeholder dapat dirangkum dalam tabel berikut, yang memperlihatkan keseimbangan antara penilaian positif dan kritikan:

**Tabel 3: Persepsi Positif-Negatif terhadap Kinerja Lembaga Akreditasi Dayah**

Aspek	Persepsi Positif	Faktor Penyebab Persepsi Positif	Persepsi Negatif / Kritik	Faktor Penyebab Persepsi Negatif
Kualitas pendidikan	Mutu pengajaran lebih terstruktur; kurikulum lebih relevan	Pendampingan, integrasi kurikulum lokal-nasional dan lokal	Sebagian dayah tetap tradisional tanpa inovasi pasca-akreditasi	Kurang pelatihan; keterbatasan SDM
Manajemen & tata kelola	Administrasi lebih rapi; akuntabilitas meningkat	Digitalisasi; sistem informasi akreditasi	Terasa hanya berfokus pada borang, bukan substansi pembelajaran	Fokus lebih besar pada dokumen
Legitimasi publik	Status terakreditasi meningkatkan kepercayaan masyarakat	Sosialisasi hasil akreditasi; publikasi peringkat	Masyarakat belum paham arti akreditasi	Sosialisasi terbatas, belum menjangkau publik luas
Peran stakeholder	Kolaborasi pemerintah, MPU, NGO meningkatkan mutu pendidikan	Regulasi (Qanun Dayah); workshop bersama	Koordinasi antar stakeholder masih lemah	Kepentingan berbeda antar pihak
Tradisi vs modernisasi	Akreditasi dipandang mendukung modernisasi tanpa menghilangkan nilai lokal	Harmonisasi standar nasional dan tradisi	Dianggap mengancam ciri khas dayah	Sosialisasi tidak cukup menekankan pelestarian tradisi

Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa persepsi positif masyarakat cenderung tumbuh ketika lembaga akreditasi aktif melakukan sosialisasi dan publikasi hasil akreditasi (Dewi & Sudiana, 2020; Iskanto et al., 2022).

Sebaliknya, persepsi negatif muncul ketika proses akreditasi dianggap hanya bersifat administratif, tidak disertai peningkatan nyata dalam kualitas layanan (Khoiriyah et al., 2024).

Selain itu, kebijakan lokal seperti Qanun Dayah berkontribusi penting. Regulasi ini memberikan kerangka legal yang memperkuat lembaga akreditasi dayah dan mendukung pelaksanaan akreditasi yang sesuai dengan nilai dan tradisi lokal (Qamariah, 2020). Dengan demikian, akreditasi tidak hanya menjadi syarat administratif, tetapi bagian dari sistem penjaminan mutu yang selaras dengan otonomi khusus Aceh.

#### **4. Analisis Kritis, Tantangan, dan Rekomendasi**

Sejumlah penelitian (Dewi & Sudiana, 2020; Iskanto et al., 2022) menunjukkan bahwa persepsi positif terhadap akreditasi tumbuh ketika lembaga akreditasi aktif melakukan sosialisasi yang menekankan manfaat dan tujuan strategis akreditasi. Sebaliknya, persepsi negatif cenderung muncul apabila akreditasi hanya dipahami sebagai kewajiban administratif yang membebani (Khoiriyah et al., 2024). Qanun Dayah berperan penting sebagai instrumen kebijakan daerah yang tidak hanya memperkuat legitimasi akreditasi dalam kerangka hukum lokal, tetapi juga menjaga keselarasan pelaksanaan akreditasi dengan nilai-nilai tradisional masyarakat Aceh (Qamariah, 2020).

Dari hasil kajian literatur dan analisis kritis, terdapat sejumlah tantangan utama yang diidentifikasi dalam pelaksanaan evaluasi kinerja lembaga akreditasi dayah di Aceh, antara lain:

- a. Resistensi internal: sebagian pengelola dayah masih memandang akreditasi sebagai upaya yang berpotensi mengikis nilai tradisional dan kemandirian lembaga.
- b. Kurangnya komunikasi publik: proses dan manfaat akreditasi belum tersampaikan secara terbuka dan komprehensif kepada masyarakat luas, sehingga menimbulkan keterbatasan pemahaman dan partisipasi.
- c. Tumpang tindih kepentingan stakeholder: munculnya ketegangan antara keinginan untuk modernisasi pendidikan dan komitmen menjaga kearifan lokal serta tradisi yang telah lama menjadi identitas dayah.

Berdasarkan hasil analisis kritis dan pemetaan tantangan tersebut, penting untuk merumuskan langkah-langkah strategis guna memperkuat efektivitas dan keberterimaan akreditasi dayah ke depan. Untuk meningkatkan kepercayaan publik dan efektivitas lembaga akreditasi dayah di Aceh, dapat dilakukan beberapa rekomendasi berikut:

- a. Memperkuat komunikasi publik melalui edukasi yang menjelaskan manfaat dan tujuan substantif akreditasi, bukan hanya sekadar penyampaian hasil penilaian.
- b. Mengharmonisasikan standar akreditasi nasional dengan konteks lokal, salah satunya melalui optimalisasi Qanun Dayah agar tetap relevan dengan karakteristik pendidikan tradisional.
- c. Mendorong evaluasi yang substantif: fokus tidak hanya pada kelengkapan dokumen administratif, tetapi juga pada kualitas proses pembelajaran, manajemen, serta profil lulusan.
- d. Melibatkan lebih banyak stakeholder strategis seperti wali santri, alumni, organisasi kemasyarakatan Islam (ORMAS), dan NGO pendidikan sebagai mitra dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Dengan demikian, akreditasi tidak lagi dipandang sekadar sebagai prosedur administratif, melainkan dapat berfungsi sebagai instrumen transformasi yang mendorong dayah menjadi lembaga pendidikan Islam yang modern, adaptif terhadap perkembangan zaman, namun tetap berakar kuat pada nilai-nilai budaya dan tradisi Aceh.

## KESIMPULAN

Proses akreditasi dayah di Aceh terbukti efektif sebagai instrumen peningkatan mutu pendidikan keagamaan. Akreditasi telah mendorong dayah untuk memenuhi standar pendidikan yang ditetapkan, memperbaiki tata kelola manajemen, serta mengadopsi praktik manajerial modern seperti perencanaan strategis, evaluasi kinerja, dan digitalisasi data. Hasilnya, terjadi peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan daya saing dayah sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional.

Selain dampak positif tersebut, proses akreditasi juga menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia terlatih, resistensi internal terhadap perubahan, dan beban administratif yang cukup besar. Potensi bias penilaian yang masih menitikberatkan pada kelengkapan dokumen administratif juga menjadi catatan penting.

Persepsi masyarakat dan stakeholders terhadap kinerja lembaga akreditasi dayah umumnya positif, karena akreditasi dinilai meningkatkan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap mutu pendidikan dayah. Namun, kritik tetap muncul terkait masih terbatasnya sosialisasi, transparansi hasil akreditasi, serta kekhawatiran hilangnya kekhasan tradisi lokal akibat penyeragaman standar.

Untuk memperkuat efektivitas akreditasi sebagai alat transformasi mutu pendidikan dayah, diperlukan langkah strategis: memperkuat komunikasi publik berbasis edukasi, harmonisasi standar nasional dengan nilai lokal melalui Qanun Dayah, evaluasi yang menekankan kualitas substantif, serta pelibatan lebih luas para stakeholder strategis, termasuk alumni dan wali santri. Dengan demikian, akreditasi dapat menjadi instrumen peningkatan mutu pendidikan yang adaptif, kontekstual, dan tetap berakar pada tradisi lokal Aceh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afridoni, A., Putra, S., Hasri, S., & Sohiron, S. (2022). Manajemen Akreditasi Sekolah Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i3.4402>.
- Albar, A., & Suhayria, S. (2021). Manajemen Strategi dan Kompetensi Profesional Dalam Pencapaian Akreditasi Sekolah. *Idarah (Jurnal Pendidikan Dan Kependidikan)*. <https://doi.org/10.47766/idarrah.v5i1.1953>.
- Allport, G. W. (1954). *The Nature of Prejudice*. Addison-Wesley.
- Arfiansyah, A., & Riza, M. (2016). Dampak Peraturan Gubernur Aceh Nomor 451.2/474/2003 terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan Dayah. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 15(2), 177-212. <https://doi.org/10.22373/jiif.v15i2.541>.
- Asy'ari, H., Munawwaroh, Z., & Azmi, U. (2021). Analisis Pelaksanaan Akreditasi Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MTs Pembangunan UIN Jakarta. *Idarah (Jurnal Pendidikan Dan Kependidikan)*. <https://doi.org/10.47766/idarrah.v5i2.124>.
- Awaludin, A. A. R. (2017). Akreditasi Sekolah Sebagai Suatu Upaya Penjaminan Mutu Pendidikan di Indonesia. *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)*, 2(1). <https://doi.org/10.30998/sap.v2i1.1156>.
- Azizah, L., & Witri, S. (2021). Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Penerapan Total Quality Management dalam Program Akreditasi Sekolah. *Dawuh Guru Jurnal Pendidikan Mi/Sd*. <https://doi.org/10.35878/guru.v1i1.263>.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Fauzi, M. F., Anindiati, I., In Nada, A. L., Rahma, H. L., Arifianto, M. L., Fauzan, M., & Dariyadi, M. W. (2022). Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Borang Standar Mutu Proses Pembelajaran untuk Persiapan Akreditasi Perdana SMP Darul Faqih Indonesia. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sains Dan Teknologi*. <https://doi.org/10.58169/jpmsaintek.v1i4.46>.
- Herianto, E., Rispawati, R., Dahlan, D., & Alqardi, B. (2019). Pelatihan dan Pendampingan tentang Persiapan Akreditasi dan Dampaknya Bagi Kesiapannya dalam Menyongsong Akreditasi. *Jurnal Pendidikan Dan*

- Pengabdian Masyarakat*. <https://doi.org/10.29303/jppm.v2i4.1568>.
- Iskamto, D., Liyas, J. N., Gultom, E., Ansori, P. B., Harwina, Y., & Hendra, T. (2022). Pelaksanaan Proses Akreditasi Sekolah untuk Menjaga Kualitas Pendidikan Sekolah/Madrasah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi*. <https://doi.org/10.54099/jpma.v1i2.132>.
- Tambingon, H. N., Labuan, B. W., Takalumang, L. M., Rompis, N. N. J., & Omkarsba, H. (2025). *Konsep Manajemen Mutu dan Perbaikan Pendidikan*. Greenbook Publisher.
- Khoiriyah, S., Nurmitasari, N., Khasanah, B. A., Qonita, S. H., Lestari, M., & Dewi, A. L. C. (2024). Pendampingan Pemetaan Kinerja Sekolah Muhammadiyah Berdasarkan Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP) 2020. *Wikrama Parahita Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 8(2), 211-218. <https://doi.org/10.30656/jpmwp.v8i2.7462>.
- Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. Sage Publications.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Sage Publications.
- Maskuri, Riza, M., & Subardi. (2020). Quo Vadis Lembaga Pendidikan Dayah Pasca Kemerdekaan Dan Pasca Reformasi. *Jurnal as-Salam*, 4(2), 284-300. <https://doi.org/10.37249/as-salam.v4i2.223>.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, E. (2023). Evaluasi Pengelolaan Dokumen Akreditasi Berbasis Cloud Google Drive Menggunakan PIECES Framework. *Jurnal Sistem Informasi Manajemen Dan Teknologi Informasi*. <https://doi.org/10.33020/jsimtek.v1i2.493>.
- Nasir, M. (2023). Abu Mudi: Resiliensi dan Eksistensi Dayah Salafi di Aceh. *Al-Ikhtibar Jurnal Ilmu Pendidikan*. <https://doi.org/10.32505/ikhtibar.v10i1.6060>.
- Naufalin, L. R., Krisnaresanti, A., & Indrayanto, A. (2022). Manajemen Data Akreditasi Melalui Sistem Informasi Arsip Akreditasi Berbasis Website. *Evokasi Jurnal Kajian Administrasi Dan Sosial Terapan*. <https://doi.org/10.20961/evokasi.v1i1.255>.
- Novidayanti, M., Rosbianti, R., Nur, M. A., & Hambali, M. (2024). Peran Akreditasi Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Sekolah Dasar. *Edukatif Jurnal Ilmu Pendidikan*. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i4.6964>.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research \& Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice*. Sage Publications.
- Prasetyo, M. M. A., Rahman, F., Haekal, M., & Salabi, A. S. (2025). Strategic

- Human Resource Cadre Development in Pesantren: A Roadmap to Organizational Resilience. *Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities*, 33(2). <https://doi.org/10.47836/pjssh.33.2.19>.
- Qamariah, I. P. (2020). Kebijakan Qanun Aceh tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah. *Produ Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2). <https://doi.org/10.15548/p-prokurasi.v1i2.3331>.
- Radliya, N. R., & Sidik, R. (2018). Rancang Bangun Sistem Repository Akreditasi Program Studi Manajemen Informatika. *Jurnal Manajemen Informatika (Jamika)*. <https://doi.org/10.34010/jamika.v8i2.1030>.
- Ragil, Y. A., Meilani, S. M., & Akbar, Z. (2020). Evaluasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i2.420>.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2012). *Management*. Pearson Education.
- Silahunudin, S. (2016). Budaya Akademik dalam Sistem Pendidikan Dayah Salafiyah di Aceh. *Miqot Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*. <https://doi.org/10.30821/miqot.v40i2.296>.
- Stufflebeam, D. L. (2003). The CIPP Model for Evaluation. In T. Kellaghan & D. L. Stufflebeam (Eds.), *International Handbook of Educational Evaluation* (pp. 31–62). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. [https://doi.org/10.1007/978-94-010-0309-4\\_4](https://doi.org/10.1007/978-94-010-0309-4_4).
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sumarto, S. (2019). Peran dan Kredibilitas Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) Mewujudkan Sekolah Efektif Melalui Manajemen Mutu. *Jurnal Literasiologi*. <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v1i1.6>.
- Yani, A., & Prasetyo, M. A. M. . (2021). Peran Majelis Permusyawaratan Ulama dalam Meningkatkan Akreditasi Pesantren di Kabupaten Bener Meriah. *IDARAH: Jurnal Pendidikan Dan Kependidikan*, 5(1), 49–60. <https://doi.org/10.47766/idarah.v5i1.2250>.
- Zà, T., Idris, S., Murziqin, R., Riza, S., & Khafidah, W. (2021). Parameter Transformasi Kurikulum Dayah Salafiyah di Aceh. *Tazkir Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*. <https://doi.org/10.24952/tazkir.v7i1.4218>.